

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dan keselamatan kerja menjadi perhatian banyak organisasi saat ini karena berkaitan dengan kemanusiaan, biaya dan keuntungan finansial, aspek hukum, tanggung jawab dan citra organisasi. Semua masalah ini sama pentingnya, meskipun beberapa perubahan perilaku terjadi baik di dalam lingkungan itu sendiri maupun melalui faktor lain di luar domain (Ervianto dan Joshua, 2001). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 265.334 kasus sejak Januari-November 2022. Jumlah tersebut naik 13,26% dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebesar 234.270 kasus (dataindonesia.id, 2023).

Kecelakaan adalah kejadian tak terduga yang dapat mengganggu proses kerja dan mengakibatkan penurunan produktivitas karena adanya pekerja yang terluka sehingga semua produksi dihentikan. International Labour Organization (ILO, 2005) menekankan pentingnya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat bekerja, khususnya di sektor konstruksi. Dasar penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pekerjaan konstruksi di Indonesia adalah: Undang-Undang Konstruksi 18 Tahun 1999, UU No. 1/1970 Keselamatan kerja, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1/1980, serta petunjuk pelaksanaan konstruksi SKB Menteri Tenaga Kerja dan Konstruksi no. 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986. Meskipun sudah terdapat undang-undang, berbagai peraturan dan standar kesehatan dan keselamatan nasional serta internasional, kecelakaan di industri konstruksi masih tinggi dan tidak dapat dihindari (ILO, 2005).

Tingginya angka kecelakaan di industri konstruksi bukan karena kurangnya kesadaran akan kesehatan dan keselamatan kerja, melainkan karena implementasi program dan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik.

Kecelakaan kerja seringkali disebabkan oleh pengabaian persyaratan keselamatan pekerja. (Soputan et al., 2014). Oleh karena itu, evaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi sangat penting. Berdasarkan keputusan peraturan Menteri Tenaga Kerja No: 09/PER/M/2008, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian dari sistem manajemen umum yang meliputi struktur, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur organisasi, proses, sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan implementasi, efektivitas dan evaluasi, dan mengikuti kebijakan kesehatan dan keselamatan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sistem manajemen keselamatan yang efektif membutuhkan kepemimpinan, tanggung jawab dan akuntabilitas, prosedur, mekanisme komunikasi, deteksi, pencegahan dan pengendalian ancaman, penyelidikan kecelakaan, dan evaluasi efektivitas program (Keller, 2009).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut maka permasalahan yang akan dianalisa adalah:

- Bagaimana kontraktor pada proyek pembangunan pengaman pantai Kota Bengkulu (TA.2022) menerapkan SMK3
- Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala dalam penerapan program SMK3

1.3 Batasan Masalah

karena ruang lingkup K3 sendiri sangat luas, kajian ini membatasi enam aspek penerapan K3 pada proyek pembangunan bangunan pengaman pantai Kota Bengkulu (TA.2022), antara lain:

- 1) Penggunaan alat pelindung diri;
- 2) Manajemen kondisi darurat;
- 3) Pekerjaan konstruksi, galian dan beton; Penggunaan bahan beracun,
- 4) Kebersihan kerja dan keselamatan kerja.

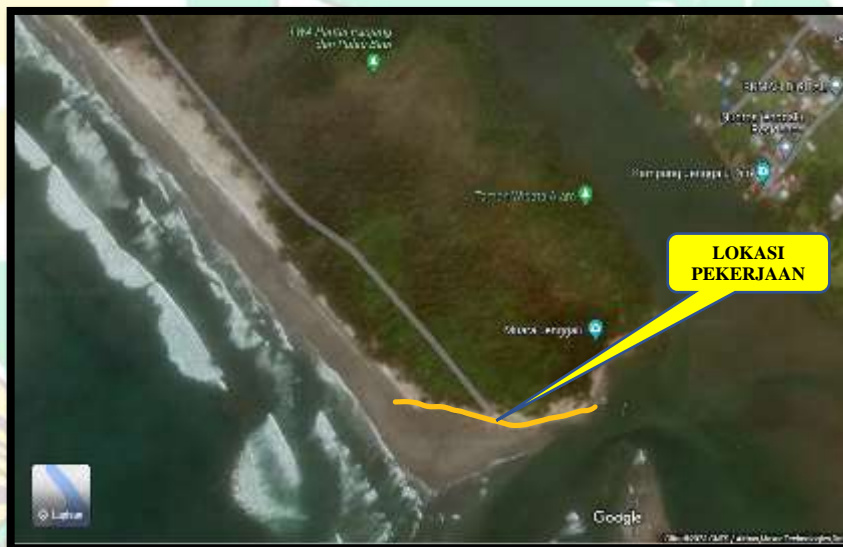
1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- 1) Dapat mengetahui bagaimana penerapan SMK3 pada proyek pembangunan pengaman pantai Kota Bengkulu (TA.2022)
- 2) Dapat mengetahui faktor pendukung dan kendala dalam penerapan program SMK3 pada proyek pembangunan pengaman pantai Kota Bengkulu (TA.2022)

1.5 Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian dalam Pembangunan Bangunan pengaman pantai ini berada di kawasan pantai dan perairan di sisi Barat pantai Panjang Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Letak area pekerjaan pembangunan Bangunan pengaman pantai Kota Bengkulu ini dengan jarak 250meter dari bibir pantai, yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Lokasi Pembangunan Bangunan pengaman pantai Panjang Kota Bengkulu, Sumber : Google Earth, 2022

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Teknis ini terdiri dari 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi mengenai dasar teori, yang akan menjelaskan tentang landasan teori mengenai pengertian keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), bagaimana penerapan K3, faktor pendukung dan kendala dalam penerapan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi mengenai pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data tersebut sesuai dengan batasan masalah yang ada.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi mengenai pengolahan data tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan bangunan pengaman Pantai Panjang Kota Bengkulu (TA.2022)

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi tindakan yang harus diambil agar pekerjaan konstruksi yang akan datang bisa sesuai dengan harapan.

